

ABSTRAK
**JAMINAN KREDIT ATAS BARANG BERGERAK PADA KOPERASI SIMPAN
PINJAM TRI WAHYU UTAMA YANG BERKEDUDUKAN DI SEMARANG**

Dewasa ini, model pengikatan jaminan yang paling banyak digunakan adalah secara fidusia. Fidusia menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, jaminan fidusia memberikan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud ataupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Upaya penyitaan yang dilakukan lembaga pembiayaan dengan “alasan” sesuai dengan klausula-klausula dalam perjanjian yang telah ditandatangani konsumen seringkali membuat debitor merasa dirugikan.

Sebagai permasalahan dalam Tesis ini: (1) Perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada debitor dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Koperasi TRI WAHYU UTAMA berkedudukan di Semarang (2) Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam menghadapi masalah pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan akta Fidusianya?

Untuk menjawab perumusan masalah tersebut dilakukan penelitian yaitu di Koperasi Simpan Pinjam Tri Wahyu Utama yang berkedudukan di Kota Semarang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridis Empiris*.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Perlindungan hukum bagi debitor pada Koperasi TRI WAHYU UTAMA secara normatif bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Implikasi dari ketentuan tersebut adalah tidak dapat dilaksanakannya parate eksekusi oleh kreditor. Penarikan benda jaminan yang tidak didasarkan pada putusan pengadilan yang tetap ataupun berdasarkan grosse akta seperti sertipikat fidusia tidak dapat dibenarkan karena melanggar undang-undang. Terhadap eksekusi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 berakibat eksekusi tidak sah sehingga pihak pemberi fidusia (debitur) dapat menggugat untuk pembatalan ke Pengadilan setempat. (2) Upaya yang dapat dilakukan para pihak dalam penyelesaian masalah eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan akta yaitu penyelesaian secara *intern* oleh kreditor dengan jalan melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah dan kekeluargaan. Penyelesaian melalui jalur hukum, maka pihak kreditor dapat menempuh jalur hukum sebagai upaya penyelesaian.

Kata Kunci : *Jaminan Kredit, Koperasi Simpan Pinjam*

ABSTRACT

CREDIT GUARANTEE FOR THE MOVABLE GOODS ON COOPERATIVE
FINANCE TRI WAHYU UTAMA DOMICILED IN SEMARANG

Nowadays, fiducia is the most used for guarantee law. Fiduciary according to Article 1 of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary is a transfer of ownership of an object on the basis of trust, provided that the object ownership are transferred remains in the control of the owner of the object, fiduciary provide security rights over movable goods either tangible or intangible and immovable. Efforts confiscation by financial institutions with "reason" in accordance with the clauses in the agreement that has been signed by the consumer often makes debtors disadvantage.

As the problems in this thesis: (1) How is legal protection for debtors in agreement with the fiduciary accounts payable that are not registered in the Cooperative Finance Tri Wahyu Utama domiciled in Semarang? (2) How do the efforts of the parties in resolving the problem of executing the fiduciary security object that is not registered deed of guarantee?

To answer the formulation of problem in this research conducted in the province of Central Java, on Cooperative Finance Tri Wahyu Utama based in Semarang. The research method used in this research is normative juridical approach.

Results of this study are: (1) Legal protection for debtors in cooperative Finance Tri Wahyu Utama normatively that the certificate Fiduciary has executorial power equal to a court decision that has obtained permanent legal force. The implication of these provisions is not be implemented parate execution by creditors. Withdrawal of collateral objects that are not based on a court decision which fixed or based grosse deed as fiduciary certificates can not be justified because it violates the law. For the execution of which is contrary to the provisions of Article 29 of Law No. 42 of 1999 resulted in the unauthorized execution so that the debtor may be sued for cancellation to the local court. (2) Efforts to do the parties to the settlement of problems of execution objects that are not registered fiduciary deed, namely the completion internally by creditors by way of a persuasive approach through consultation and kinship. Settlement through legal channels, then the creditors can take legal action in an attempt settlement.

Keywords: *Credit Guarantee, Cooperative Finance*